



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Suciati Azizah  
NIM : C02207032  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah  
Judul Skripsi : "Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital Oleh  
"Omah Digital" Melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya  
Dalam Perspektif Wakalah bi Al-'Ujrah".

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2011

Suciati Azizah menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
Pajak Penghasilan  
20

BCEC4AAF743897848

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Suciati Azizah

C02207032







## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Kajian Pustaka .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16











Artinya: “*Dari Jabir ibn ‘Abdillah r.a ia berkata: saya mau pergi ke Khaibar, lalu saya menghadap kepada Nabi SAW dan beliau bersabda: “kalau kau jumpa wakilku di Khaibar, ambillah dari pdanya lima belas wasaq”. Diriwayatkan dan disahkan oleh Abu Daud.*<sup>2</sup>

Hadist lainnya adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ . الْحَدِيثُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari ‘Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW pernah mengutus Umar untuk mengurus sedekah”. Al-Hadist, Muttafaq ‘alaih.*<sup>3</sup>

Ekspedisi merupakan jasa pengiriman barang atau surat-surat dan sebagainya. Dalam hal ini ekspedisi diberi kuasa oleh orang yang mengirimkan barangnya ke suatu tempat baik dalam maupun luar kota, luar pulau ataupun luar negeri. Oleh karenanya, sebagai penerima kuasa ekspedisi harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1801 yang berbunyi”si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun, itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-

---

<sup>2</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, terjemahan Muh Sjarief Sukandy, (Bandung: PT. Alma’arif, Cet. 12,1996), 325.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 326.









1. Dari segi teoritis (keilmuan)
  - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam teori *wakalah bi al-'ujrah* yang berkaitan dengan transaksi pengiriman barang-barang digital oleh “Omah Digital” melalui jasa ekspedisi di Surabaya
  - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.
  - c. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
2. Dari segi praktis (terapan)

Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai transaksi pengiriman barang-barang digital oleh “omah digital” melalui jasa ekspedisi di Surabaya pada khususnya, agar pihak ekspedisi dan “Omah Digital” dapat mengaplikasikan sesuai dengan *wakalah bi al-'ujrah*.

#### F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dengan judul “Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh “Omah Digital” Melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya dalam Perspektif *Wakalah bi*







Elteha International dalam pengangkutan barang hantaran, upaya untuk menuntut ganti rugi dari pihak pengirim atau penerima barang adalah mengajukan tuntutan langsung kepada PT. Elteha, dengan menunjukkan surat permohonan ganti rugi kerugian dan membawa resi, dan menurut hukum Islam, tanggung jawab PT. Elteha International Ltd. Dalam pengiriman barang hantaran “diperbolehkan” selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Kajian lainnya yaitu “Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya” ditulis oleh Shofan Fitriani 2006, yang membahas tentang kepuasan kerja karyawan PT Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya dipengaruhi oleh iklim komunikasi dan tingkat pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya sebesar 0,19 yang menyatakan bahwa pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Jawa Pos Expedisi Mandiri Surabaya tergolong sangat rendah.

## **H. Metode Penelitian**

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan di percetakan “Omah Digital” Sukolilo Surabaya, karena banyaknya masalah dalam transaksi pengiriman barang-barang Digital oleh "Omah digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya. Oleh karena masalah transaksi pengiriman barang-barang digital ini banyak di









dipahami lebih tepat dan benar pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi Landasan Teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa pokok-pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh “Omah Digital” melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya. Diantaranya: Transaksi pengiriman barang dalam *Wakalah*, Pengertian *Wakalah*, landasan hukum *Wakalah*, Rukun dan Syarat *Wakalah*, macam *Wakalah*, berakhirnya akad *Wakalah* dan Hikmah *Wakalah*.

Bab III : Merupakan hasil dari penelitian tentang Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh “Omah Digital” melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya. Yang memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari: Sejarah berdirinya “Omah Digital” Surabaya, mekanisme transaksi penjualan barang-barang digital, mekanisme pengiriman barang oleh “Omah Digital” Surabaya, perjanjian dan aturan dalam ekspedisi.



- Bab IV** : Bab ini berisi analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh “Omah Digital” melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya dan analisis Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh “Omah Digital” melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya Dalam Perspektif *Wakalah bi al-'ujrah*.
- Bab V** : Tentang Penutup, Pada bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.





syarat tertentu.<sup>5</sup> Jadi *wakalah bi al-'ujrah* adalah pemberian kuasa dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan pemberian upah atas jasanya.

Pengertian secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Namun demikian perlu dicatat bahwa pemberian kuasa kepada seseorang ini hanyalah menyangkut perbuatan hukum yang dapat diwakilkan saja, dan lazimnya semua perjanjian atau akad yang dibuat sendiri oleh manusia. Sedangkan menyangkut pekerjaan yang tidak dibuat sendiri, seperti salat tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Sebab tujuan dari salat adalah untuk melaksanakan kewajiban individu kepada Khāliqnya dan tidak terkena sasarannya kalau dilakukan oleh orang lain.<sup>6</sup>

Dalam jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dapat dikategorikan dalam *wakalah bi al-'ujrah*. Umat sepakat bahwa *wakalah* boleh dilakukan karena diperlukan. *Wakalah* sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Dalam akad *wakalah* ini bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dengan alasan, ketika Rasulullah mengirimkan duta untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan gaji kepada mereka (HR. 'Abu Dawud).

---

<sup>5</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Edisi Lengkap, Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu dan Sunrawaidi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1994), 19.

Ketika akad *wakalah bi al-'ujrah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil dihukumi layaknya *'ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Jika dalam akad *wakalah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *'ujrah al misl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan jika dalam suatu adat tidak diberlakukannya pemberian upah, maka akadnya menjadi *tabarru'* dan tidak bersifat mengikat sehingga wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.<sup>7</sup>

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa *wakalah bi al-'ujrah* adalah pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengelola dana dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga angka 2 (dua) fatwa ini dengan imbalan pemberian *'ujrah (fee)*. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008), 240.

<sup>8</sup> M.A Sahal Mahfudh, *Fatwa MUI Wakalah bil 'ujrah*, [www.halalguide.info/content/view/194/54](http://www.halalguide.info/content/view/194/54), 26 Mei 2006.























#### D. Macam *Wakalah*

Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu persatunya perkara, oleh karena apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, oleh karena hal itu mengandung kesamaran. Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perkaranya). Pendapat ini lebih logis, oleh karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali pada apa yang telah disepakati kebolehnya.<sup>26</sup>

Subekti mengemukakan “pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”.<sup>27</sup> Sedangkan apabila pemberian kuasa itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka pemberian kuasa haruslah dengan “kuasa khusus”, yaitu dengan cara mengemukakan perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa secara jelas. Adapun perbuatan-perbuatan yang harus dikuasakan dengan kuasa khusus ini seperti: memindahtangankan (menjual, menghibahkan, tukar-menukar, mewakafkan) sesuatu barang, menggadaikan, membuat suatu perdamaian dan mengajukan perkara di depan Pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtabid*, 371.

<sup>27</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet ke-8, 1989), 143.

<sup>28</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 24.



Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan (bahasa Belanda: “*Beheren*”), misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu.<sup>29</sup>

#### E. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi tidak waras, sebab dengan terjadinya kematian dan ketidakwarasan berarti syarat sahnya perjanjian kuasa tidak terpenuhi.
2. Dihentikannya pekerjaan dimaksud, sebab dengan berhentinya pekerjaan yang dikuasakan, secara otomatis pemberian kuasa tidak bermanfaat lagi.
3. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa
4. Penerima kuasa memutuskan sendiri
5. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status pemilikan.<sup>30</sup>

Meskipun, sebagaimana telah kita lihat, pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila si pemberi kuasa atau si penerima kuasa meninggal. Pemberian

---

<sup>29</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, 144.

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1994), 25.







Dalam bisnis ini bapak Nanang Maulana bukanlah pemilik barang akan tetapi merupakan sebagai broker suatu perusahaan alat-alat digital. Pemesanan barang bisa sampai negeri Cina sesuai permintaan konsumen. Walaupun hanya sebagai broker, namun bapak Nanang Maulana selalu bertindak profesional dalam melayani para konsumennya. Pandai menanamkan kepercayaan kepada para konsumen, dan itu semua tak lain atas kejujuran yang selalu menjadi pedoman utama bapak Nanang Maulana dalam mengelola bisnisnya. Beliau selalu memberi yang terbaik serta kepuasan kepada para konsumen. Sehingga sampai sekarang banyak para pelanggan yang sangat mempercayainya, walaupun tidak pernah bertatap muka dengan pemilik usaha ini karena kebanyakan para konsumen memesan barang via telepon dan dikirim melalui jasa ekspedisi.

Tahun ke tahun bisnis ini semakin berkembang, maka pada tahun 2006 bapak Nanang Maulana membuka usaha baru yaitu sebuah percetakan di daerah Sukolilo Surabaya yang diberi nama "Omah Digital". Percetakan "Omah Digital" didirikan pada tahun 2006 dengan ijin usaha berbentuk CV, yang didirikan di daerah Keputih Sukolilo Surabaya serta membuka cabang di Pusat Grosir Surabaya. Percetakan ini merupakan percetakan baner, pembuatan mug-mug cantik yang dapat dihias dengan foto kesukaan para





Pemesanan barang yang melalui internet atau via telepon harus benar-benar ada mufakat antara kedua pihak, bila pihak pembeli sudah benar-benar setuju atas harga barang dan produknya, pembeli disarankan untuk mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan karena barang tidak akan dikirim bila uang belum ditransfer, dan pihak “Omah digital” akan segera mengirim barang kurang lebih dalam 3 hari setelah uang masuk rekening. Pembeli dapat mengambil sendiri barang-barang digital dan dapat pula meminta untuk dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

### **C. Mekanisme Pengiriman Barang oleh “OMAH DIGITAL” di Surabaya**

Pengiriman barang dilakukan setelah konsumen telah benar-benar cocok dengan barang pilihannya dan bersedia mentransfer uang sesuai harga yang telah disetujui kedua pihak yaitu antara konsumen dan pihak “Omah Digital”. Barang akan dikirim setelah uang transfer telah masuk dalam rekening pemilik “Omah Digital”, karena bila uang belum masuk maka barang juga belum bisa dikirim. Ini dilakukan untuk menghindari penipuan-penipuan yang banyak terjadi di jaman sekarang.

Barang akan dikirim secepatnya bila barang masih ada stok, akan tetapi bila stok barang habis, maka konsumen disarankan untuk menunggu dalam







barang hilang. Oleh karena konsumen belum menerima barang yang diminta maka “Omah Digital” harus mengirim kembali yang menjadi hak dari konsumen.

Dari kejadian di atas, pihak ekspedisi seharusnya tidak menerima barang bila alamat kurang jelas dari pihak pengirim sehingga barang tidak akan hilang atau tidak sampai pada tujuan. Sebagai jasa pengirim yang telah sepakat untuk mengirimkan barang kepada alamat yang dituju maka pihak ekspedisi harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Bagi pihak pengirim, “Omah Digital” juga harus berhati-hati dalam memberi alamat yang dituju, karena alamat sangatlah penting demi kelancaran pengiriman barang.

### 3. Kiriman tidak tepat waktu padahal dikirim melalui biaya kilat

Hal ini sering sekali terjadi, tidak hanya “Omah Digital” yang mengalami akan tetapi sebagian banyak pengirim barang yang melalui jasa ekspedisi akan mengalami hal ini, mereka telah membayar mahal untuk mengirim barangnya melalui biaya kilat agar cepat sampai pada tujuan namun barang sampai di tempat tujuan tidak tepat waktu dan hal ini yang membuat para pengirim kecewa.

Untuk mengurangi kejadian di atas, maka pihak ekspedisi harus benar-benar konsekuen atas tugasnya yang diberi amanah untuk mengirimkan barang, bila sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak untuk mengirimkan kilat dan pihak “Omah Digital” juga telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar ongkos sesuai yang telah ditentukan, maka pihak ekspedisi juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

#### 4. Barang pecah/rusak ketika sampai pada pembeli

Sebagai penjual barang-barang digital, pihak “Omah Digital” harus berhati-hati dalam mengirimkan barangnya karena barang yang akan dikirim adalah barang yang mudah pecah/ rusak. Sehingga dalam mengepack/ membungkus barang harus benar-benar kuat untuk menghindari keretakan pada barang. Pengiriman melalui jasa ekspedisi memang penuh risiko selain barang yang akan dikirim bermacam-macam dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi karena kelalaian pihak ekspedisi barang akan bisa terjadi keretakan dan kerusakan.

Dari kasus-kasus di atas, pihak “Omah Digital” sudah berulang kali melakukan komplain terhadap pihak ekspedisi namun melalui proses yang sangat





Ekspedisi TiKi adalah salah satu ekspedisi yang sering digunakan oleh pihak “Omah Digital” karena ekspedisi ini merupakan ekspedisi yang besar dan menyebar diseluruh pelosok Indonesia bahkan sampai internasional. TiKi sudah berdiri dan dipercaya oleh masyarakat selama 35 tahun lamanya. Ada 50 agen TiKi yang tersebar di daerah Surabaya, dan semua agen akan beroperasi secara *online*. Oleh karenanya barang siapa yang akan menjadi agen TiKi ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi di antaranya adalah :

- a. Harus ada komputer, orang yang akan menjadi agen TiKi harus mempunyai komputer baik beli di TiKi maupun beli di luar dan akan deprogram oleh TiKi Pusat.
- b. Calon agen TiKi harus membayar Jaminan 20 juta untuk yang sudah mempunyai komputer sendiri sedangkan yang belum mempunyai computer harus membayar jaminan sebesar 25 juta rupiah.
- c. Jarak antara agen satu dengan yang lainnya harus berjarak sekurang-kurang 2 km. ini dilakukan untuk menghindari adanya persaingan yang kurang baik sesama agen TiKi.













dengan banyak agen TiKi, sehingga akan diselidiki terlebih dahulu agen mana yang harus bertanggungjawab atas hilangnya barang.

## 2) Penggantian barang rusak

Tak sedikit yang mengeluhkan akan kerusakan barang yang dikirim, oleh karenanya pihak TiKi akan menanyakan kepada pihak konsumen jenis barang yang akan dikirim. Pihak ekspedisi harus mengetahui jenis-jenis barang yang akan dikirim agar bisa memisah antara barang yang mudah pecah/retak dengan barang yang tidak mudah pecah/retak. hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya kerusakan yang terjadi dalam pengiriman. Bila barang yang akan dikirim berupa barang pecah belah atau yang mudah pecah, maka pihak ekspedisi akan menganjurkan untuk membungkus barang dengan bahan yang kuat, misalnya konsumen ingin mengirim komputer maka barang tersebut harus dikemas dengan bahan yang tebal dan dilapisi dengan kayu yang kuat untuk menghindari keretakan pada barang.

Namun pada kenyataannya, hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan pada barang yang dikirim, sehingga pihak ekspedisi harus bertanggungjawab akan kerusakan

tersebut. Seperti penggantian barang hilang maka barang yang rusak juga akan diselidiki terlebih dahulu akan rusaknya barang, di agen atau bandara barang tersebut rusak, bila rusaknya barang disebabkan kelalaian dari agen TiKi, maka akan diselidiki di agen mana rusaknya barang sehingga agen tersebut yang akan bertanggungjawab untuk mengganti kerusakan barang.

Dalam penggantian barang ini, disesuaikan dengan nominal harga barang tersebut atau bisa diganti dengan 10x ongkos kirim. Untuk menghindari hal ini pihak ekspedisi menganjurkan kepada konsumen yang akan mengirim barang-barang digital atau barang lainnya yang mudah pecah/retak untuk menggunakan pengiriman yang diasuransikan yaitu dengan biaya asuransi 10x ongkos kirim. Akan tetapi asuransi ini tidak akan kembali meskipun barang yang dikirim tetap aman dalam pengiriman, karena asuransi ini sudah dianggap sebagai tambahan biaya.

### 3) Barang hilang/rusak disebabkan bencana alam

Hilangnya barang atau rusaknya barang disebabkan oleh bencana alam pihak ekspedisi TiKi tidak bertanggungjawab dalam hal ini. Karena ini bukan termasuk kelalaian dari pihak ekspedisi

melainkan bencana alam. Penggantian barang menjadi tanggungjawab ekspedisi TiKi bila barang tersebut disebabkan karena kelalaian dari pihak ekspedisi, kecuali barang yang beransuransi akan tetap diganti oleh pihak ekspedisi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Suwarno, *Wawancara*, Surabaya, 9 Mei 2011.





cepat, tidak hanya pengusaha, para konsumen lainnya yang mempunyai kesibukan padat sangatlah membutuhkan transaksi ini. Dengan adanya jasa ekspedisi yang semakin meluas di negeri ini dapat mempermudah perdagangan dan memperlancar laju perekonomian di Indonesia dan ini suatu kelebihan dari transaksi pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Namun setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, dalam hal pengiriman barang pasti akan ada resiko yang akan ditanggung baik oleh pihak ekspedisi maupun pihak konsumen.

Dalam transaksi pengiriman barang-barang digital yang dilakukan oleh “Omah Digital” melalui jasa ekspedisi, seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, hal ini disebabkan karena kelalaian dari pihak ekspedisi. Banyak jasa ekspedisi yang dimanfaatkan oleh “Omah Digital”, namun ada beberapa yang pelayanannya kurang memuaskan sehingga membuat “Omah Digital” harus pindah ke ekspedisi yang lain.

Dalam hal ini ekspedisi juga bisa disebut sebagai jasa pengangkutan yang mana perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak berjanji untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Undang-undang ada perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspediter. Ekspediter hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman hanya barang saja dan pada hakekatnya hanya memberikan



Dalam hal ini transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya "diperbolehkan" selama tidak merugikan salah satu pihak dan melanggar dari syariah Islam. Namun bila ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya baik dari pihak ekspedisi maupun pihak "Omah Digital", maka ini harus ditinjau kembali keabsahan hukumnya berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu ada baiknya dalam hubungan ini kami analisis transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya dalam perspektif *Wakalah bi al-'Ujrah*.

**B. Analisis terhadap Transaksi Pengiriman Barang-barang Digital oleh "Omah Digital" melalui Jasa Ekspedisi di Surabaya Dalam Perspektif *Wakalah bi al-'ujrah***

Meluasnya transaksi pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dipenjuru dunia termasuk di Negara-negara Islam, maka kajian hukum Islam tidaklah berdiam diri dalam mendudukan hukumnya. Perlunya tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan perbuatan hukum tersebut. Transaksi pengiriman barang melalui jasa ekspedisi merupakan akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab-kitab fiqih klasik, sehingga hal ini menimbulkan persoalan yang harus dikaji sesuai dengan hukum Islam.

Untung rugi adalah hal biasa dalam setiap usaha, hal ini juga yang sering dialami oleh “Omah Digital” sebagai penyedia barang-barang digital, tak sedikit kerugian yang harus ditanggung oleh “Omah Digital” karena harus mengirim kembali barang-barang yang hilang atau rusak dalam pengiriman melalui jasa ekspedisi. Berkali-kali komplain yang diajukan kepada pihak ekspedisi membuat pihak “Omah Digital” bosan karena merasa tidak ditanggapi. Sedangkan para konsumen yang membeli barang-barang digital juga mendesak harus mengirim kembali barang yang diminta. Hilangnya barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi membuat pihak “Omah digital” harus mengirim kembali barang tersebut kepada pembeli. Keterlambatan barang sampai pada tujuan membuat pihak “Omah Digital” merasa dirugikan karena selain harus mengeluarkan biaya ongkos kirim yang mahal demi cepatnya pengiriman barang yang dikirim kepada pembeli, namun akhirnya barang juga telat sampai pada tujuan dan inilah yang bisa membuat pembeli kecewa dan bisa mengurangi kepercayaan pembeli kepada pihak “Omah Digital”.

Namun tidak hanya dari kasus-kasus yang terjadi di “Omah Digital” yang perlu kita kaji, alasan-alasan dari pihak ekspedisi juga harus kita perhatikan. Pada bab sebelumnya telah kita teliti, bahwasanya penggantian barang yang hilang disebabkan karena kelalaian pihak ekspedisi dalam hal ini ekspedisi Tiki, maka pihak ekspedisi akan mengganti segala barang yang hilang namun hilangnya barang tersebut harus diselidiki terlebih dahulu, pihak agen mana yang

harus bertanggungjawab atau bisa jadi pihak bandaralah yang akan bertanggungjawab atas hilangnya barang tersebut, karena pengiriman barang pada ekspedisi Tiki melalui angkutan udara. Begitupun juga dengan penggantian barang yang rusak, pihak Tiki akan mengganti barang yang rusak apabila dikarenakan kelalaian pihak ekspedisi dan ini juga sama akan diteliti terlebih dahulu agen mana yang harus bertanggungjawab dalam hal ini karena bisa jadi ada kelalaian dari pihak pengirim sendiri, karena barang-barang digital sangatlah rentan untuk rusak maka pihak pengirim harus benar-benar serius dalam mengepak barang demi keamanan barang yang dikirimnya.

Sedangkan penggantian barang-barang dikarenakan bencana alam, maka pihak ekspedisi tidak bertanggungjawab penuh atas barang yang dikirimnya. Karena bukan termasuk dari kelalaian-kelalaian dari pihak ekspedisi. kecuali untuk barang-barang yang beransuransi akan tetap diganti oleh pihak ekspedisi.

Lamanya waktu penggantian barang yang hilang dan rusak disebabkan karena banyaknya serta lamanya konfirmasi dari agen yang seharusnya bertanggungjawab. Inilah yang membuat pihak ekspedisi harus dikomplain oleh pihak pengirim dan salah satunya adalah pihak "Omah Digital". Sedangkan komplain yang ditujukan kepada ekspedisi dikarena keterlambatan pengiriman barang kepada tujuan itu merupakan kelalaian pihak ekspedisi yang mungkin disebabkan lambatnya penerbangan di bandara atau agen setempat.















4. Sebagai pengirim barang atau muwakkil, pihak “Omah Digital” hendaklah mentaati segala aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
5. pihak “Omah Digital” dan pihak ekspedisi hendaknya dapat menunaikan rukun dan syarat wakalah bi al-’ujrah sebagai muwakkil dan wakil.



Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terjemahan Muhammad Afifi dan Andul Hafiz, Jakarta, Almahira, cetakan 1, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Jakarta, Risalah Press, 1992

[www.bisnisidigital.net](http://www.bisnisidigital.net)

“Ekspedisi TIKI”, dalam <http://www.tiki-online.com/home>, 29 April 2011